

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan didefinisikan sebagai “rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara mengarah pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Penyelenggaraan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah beserta segala aparat dan seluruh jajarannya, meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah yang cukup dominan. Singkatnya, pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada masyarakat yang hanya berperan sebagai penonton, semua diharuskan berpartisipasi sebagai pemain¹.

Proses pembangunan harus menerapkan transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi yang terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Pemberdayaan dengan keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Diperlukan kerja sama berbagai pihak yang

¹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 4-6.

terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia².

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada dasarnya mengedepankan kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial³. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan gotong-royong memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa di informasikan kepada masyarakat desa dan di integrasikan dengan rencana pembangunan. Masyarakat desa berhak mengetahui informasi dan dapat melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan dari program pembangunan desa.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di pembangunan. Keterlibatan masyarakat atau biasa disebut dengan partisipasi merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu dan indikator

² Department for International Development (DFID), *Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif*, 2004, hlm. 106-107.

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

keberhasilan dari pembangunan. Melalui partisipasi, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan tanggung jawab serta rasa memiliki warga terhadap pembangunan di desa mereka.

Pengelolaan pembangunan desa secara konsep diatur dalam UU haruslah melibatkan seluruh komponen desa baik itu aparatur desa, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu kunci dalam tata pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴. Prinsip persamaan menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, dan golongan. Dalam konteks pembahasan ini sehingga dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam mensukseskan program pembangunan. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk keikutsertaannya dalam pembangunan.

Perempuan dalam pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif dan posisi perempuan dalam proses pembangunan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Proses pembangunan tidak terlepas dari *culture based* atau dasar budaya yang melandasi karakter pembangunan di Indonesia yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek daripada subjek. Perempuan menjadi

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

subjek adalah sebuah keharusan, karena pembangunan mengatur kebutuhan dan peningkatan hidup baik laki-laki atau perempuan⁵. Tetapi dalam proses pembangunan masih terkesan sangat patriarki, dapat dilihat dari jumlah pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dari segi kuantitas masih lebih banyak di duduki oleh laki-laki yang ada dalam struktur perangkat desa dan staf kelurahan.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini berjudul Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Gading, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin oleh Pratitis Offi Agnes, Diana Dewi Sartika, dan Yunindyawati. Hasil penelitian perempuan berpartisipasi di Musyawarah Rencana Pembangunan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Partisipasi yang biasanya dilakukan oleh perempuan di Desa Pulau Gading berupa partisipasi pikiran (*ide*), tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian.

Tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang dan PKK keduanya tergolong rendah. Faktor pendorong partisipasi perempuan terdiri dari dua macam, yaitu secara internal kemauan dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, sedangkan secara eksternal pengaruh orang lain dan kebijakan pemerintah berupa program-program yang mengharuskan partisipasi perempuan. Kendala atau penghambat partisipasi perempuan secara internal yaitu rendahnya pendidikan perempuan dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah, sedangkan

⁵ Yuyun Agus Riani, *Partisipasi-partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa* <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-desaa-uu-no-62014-peluang-dan-tantangan-yuyun-agus-riani/> diakses pada 19 Februari 2023 pukul 05.43 WIB.

secara eksternal rendahnya akses perempuan terhadap informasi pembangunan desa, faktor sosial budaya, dan faktor letak geografis⁶.

Penelitian yang lainnya dalam bentuk jurnal oleh Risfaisal dan Neng Sri Nuraeni berjudul Partisipasi Sosial Perempuan dalam Pembangunan Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi sosial perempuan dalam pembangunan desa di desa Lasiai yaitu dengan 3 tahap, tahap pertama perencanaan dengan perempuan hadir dalam acara rapat musyawarah yang diadakan desa. Kedua, tahap pelaksanaan dengan meningkatkan pemberdayaan sebagai program seperti program cinta Aquran dan program desa siaga aktif yang melibatkan perempuan. Ketiga tahap pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan. Dampak positif partisipasi sosial perempuan dalam pembangunan desa pemikiran perempuan menjadi terbuka dalam hal pendidikan, perekonomian, dan kepemimpinan perempuan. Dampak negatif adanya pemberian label atau *stereotype* terhadap perempuan⁷.

Kedua penelitian terdahulu yang di paparkan diatas memiliki perbedaan dan persamaan dengan rencana penelitian ini yaitu persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang partisipasi perempuan dan perbedaannya dari segi aspek lokasi penelitian, serta aspek penggunaan konsep/teori penelitian.

⁶Partitis Offi Agnes, dkk., *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Gading, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin*, Jurnal Empirika, Volume 1, No. 2, November 2016, hlm. 141-160.

⁷Risfaisal dan Neng Sri Nuraeni, *Partisipasi Sosial Perempuan dalam Pembangunan Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, MIMIBAR Agama Budaya, Volume 36, No. 9, Tahun 2019, hlm. 133-144.

Peneliti mengambil Desa Sumber Harum sebagai tempat penelitian, setelah dilakukan observasi dan wawancara terdapat beberapa permasalahan partisipasi perempuan di desa Sumber Harum, data di desa Sumber Harum menunjukkan jumlah laki-laki adalah 1.548 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 1.818⁸. Berdasarkan data tersebut terlihat jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun, kenyataannya perempuan tidak mendominasi dalam hal partisipasi di pembangunan. Permasalahan partisipasi perempuan di desa Sumber Harum yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran perempuan dalam pembangunan yaitu terbukti dengan sulit mengumpulkan perempuan pada saat musyawarah di aula kantor desa atau ditingkat dusun.

Partisipasi perempuan pada proses pembangunan perempuan hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan, namun mereka tidak mengajukan kritikan terhadap program yang akan direncanakan. Dalam hal keputusan perempuan cenderung mengikuti karena keputusan lebih di dominasi oleh laki-laki. Serta implementasi program yang akan dijalankan hanya akan terlaksana sesuai dengan dana anggaran. Dalam pemberian evaluasi tidak semua orang dapat mengevaluasi program yang dilaksanakan hanya terwakilkan oleh beberapa orang. Mantan Kepala desa Desa Sumber Harum tahun 2016-2021 mengatakan bahwa partisipasi perempuan di desa Sumber Harum dalam hal pembangunan desa hanya mencapai 25 persen⁹. Terdapat beberapa program yang tidak melibatkan perempuan di dalamnya, seperti program SDGs (*Sustainable Development*

⁸ Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, *Data Pokok Desa/Kelurahan. DATA POKOK DESA/KELURAHAN (kemendagri.go.id)* di akses pada tanggal 17 Mei 2024.

⁹ Wawancara dengan Bapak Karman sebagai Mantan Kepala Desa Sumber Harum, tanggal 09 April 2021.

Goals/tujuan pembangunan berkelanjutan) yang mana program ini hanya diikuti oleh laki-laki.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul: **Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Sebagai Bentuk Perwujudan Kesetaraan Gender di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan diambil dan di jawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Partisipasi perempuan manakah yang paling kuat dalam pembangunan desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca serta memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di desa Sumber Harum.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat yang ingin memahami partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan peran serta partisipasi perempuan dalam pembangunan desa serta bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan kesempatan untuk menerapkan teori-teori dalam perkuliahan ke dalam dunia nyata.

E. Landasan Teori

Penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi diperlukan seperangkat teori yang akan dijadikan acuan bagi peneliti yang dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu dalam hal pengamatan dan penelaahan yang terjadi seperti gejala ataupun peristiwa yang dipilih oleh peneliti dan kemudian diangkat dari lapangan berdasarkan teori-teori sehingga mempermudah penulis. Teori-teori yang digunakan dikutip dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Partisipasi

1.1 Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi merupakan keterlibatan dan keikutsertaan yang keduanya mengandung kesamaan meski keduanya memiliki penekanan arti yang berbeda. Keterlibatan memiliki keterkaitan dengan siapa saja yang terlibat sedangkan keikutsertaan berkaitan dengan bagaimana masyarakat terlibat. Jadi, dapat diartikan bahwa keterlibatan lebih menjurus semua orang sedangkan keikutsertaan menjelaskan proses bagaimana masyarakat dapat terlibat.

Partisipasi berarti peran dari seseorang atau sekelompok orang dalam proses pembangunan yang berupa pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan sebuah masukan pikiran, waktu, tenaga, keahlian, dan materi. Sedangkan menurut Soetrisno, mendefinisikan partisipasi itu sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dukungan itu bukan hanya sekedar pelaksanaan pada program yang ditentukan tetapi juga sebagai

bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik sebagai proses evaluasi program tersebut dijalankan¹⁰.

1.2 Jenis Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff tingkatan partisipasi terbagi menjadi empat jenis. Keempat jenis partisipasi ini jika dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan kegiatan program yang berintegrasi dengan potensi yang ada. Keempat jenis partisipasi tersebut adalah pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*). Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*). Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*participation in benefits*). Keempat, partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

- 1) Partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan (*Participation in decision making*) yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan serta perencanaan program. Wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan kehadiran rapat, diskusi, menyumbangkan pemikiran atau gagasan, memberikan saran atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

¹⁰Akbar Pandu Dwinugraha, *Kaum Perempuan dan Partisipasinya dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Malang*, Ilmu Administrasi Publik, Volume 4, Tahun 2019, hlm. 168.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in implementation*) yaitu dengan memberikan partisipasi dalam bentuk nyata yang berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang ataupun partisipasi dalam bentuk harta benda.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*Participation in benefits*) dapat diwujudkan dengan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam pemanfaat atas suatu hasil dari program yang dijalankan.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluation*), dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dalam menilai serta mengawasi kegiatan dari program yang dijalankan¹¹.

2. Kesetaraan Gender

Istilah gender dikonsepsikan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat kodrat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak dini. Menurut Oakley Stoller dalam bukunya berjudul *Sex, Gender and Society* mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan yang berarti bukan bersifat biologis dan bukan juga kodrat Tuhan. Stoller mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia¹².

Gender merupakan perbedaan perilaku terkait dengan tugas dan fungsi dari laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial budaya, perbedaan ini

¹¹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 152.

¹² Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.2

bukan berdasarkan ketentuan dari Tuhan melainkan dikonstruksikan oleh manusia melalui proses sosial di masyarakat dalam waktu yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan tidak diukur secara biologis, namun melalui proses sosial di masyarakat. Gender dapat berubah dari suatu wilayah ke wilayah lain, dari suatu waktu ke waktu di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah bentuk sosial yang dapat diubah atau bukan bawaan lahir, yang dapat dibentuk atau diubah tergantung dari wilayah, waktu, status sosial, pemahaman agama, politik, ideologi, hukum dan ekonomi. Namun, kebudayaan yang masih melekat di masyarakat yaitu budaya patriarki menafsirkan bahwa perbedaan biologis laki-laki dan perempuan menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku sehingga berujung pada pembatasan hak, partisipasi, kontrol dan sumber daya. Sehingga tuntutan tugas, peran, kedudukan dan kewajiban yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat sangat beragam. Sepertinya laki-laki dianggap tidak pantas bila memasak di dapur, membersihkan rumah dan tabu bagi perempuan bila keluar rumah untuk bekerja.

Kesetaraan gender memiliki arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki status yang setara dan kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan terkait dengan pembangunan,

mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan yang menguatkan kesetaraan partisipasi.

Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. Akses

Aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya yang akan dibuat.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam hal pengambilan keputusan.

3. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil apakah memberikan atau menjamin manfaat

yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak dikemudian hari¹³.

3. Pembangunan Desa

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam masyarakat, pembangunan sering diartikan sebagai pembangunan dalam perwujudan fisik. Menurut Siagian pembangunan diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan yaitu usaha mencapai tujuan Bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia¹⁴.

Pembangunan ialah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk

¹³ Ida Suselo, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: cetakan ke 2, 2012), hlm. 41-43

¹⁴ Effendi Bachtiar. *Hal Utama dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Ansi Offset, 2002), hlm. 9.

mencapai aspirasinya yang humanistic, aspirasi yang humanistic tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*)¹⁵.

Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik. Perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan keberlangsungan secara terus menerus. Dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional¹⁶.

Menurut Denis Goulet paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai-nilai yang seharusnya terdapat dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakiki dari pembangunan, yaitu:

1. Menunjang kelangsungan hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan penunjang kelangsungan hidup itu meliputi pangan, papan, kesehatan dan rasa aman.
2. Harga diri, kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Nilai kedua dalam suatu kehidupan yang baik ialah harga diri, perasaan menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat untuk orang lain semata-mata untuk kepentingan orang lain.
3. Kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan, kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dalam konsep pembangunan ini adalah kebebasan.

Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan dalam politik ataupun

¹⁵ Ali Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Depok: Kencana. 2017.), hlm. 29.

¹⁶ Angelia E. Manembu, “Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”, *Ilmu Politik*, 2017, hlm. 3

ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih sederhana yaitu kebebasan dari perampasan kondisi material kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, dan lembaga-lembaga atau keyakinan yang dogmatik¹⁷.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, fasilitas umum, dan bangunan. Sedangkan pembangunan non fisik menurut Wresniwiro adalah jenis pembangunan yang tercipta dari dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik dapat berupa peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pembangunan non fisik sering di sebut dengan pembangunan masyarakat, dan berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Bagian dari pembangunan non fisik meliputi:

1. Pembangunan manusia yaitu suatu proses yang ditujukan untuk masyarakat memperluas pilihan-pilihan bagi penduduknya sebagai tujuan akhir. Pembangunan manusia disini yakni suatu proses pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Seperti PKK dan Program pelatihan membuat kerajinan.
2. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembangunan

¹⁷ Kasnawi, M. Tahir and Ramli AT, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. In: Konsep dan Teori Pembangunan. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015).

ekonomi ini berarti suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

3. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan disini adalah suatu proses pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kemampuan kesehatannya yakni dalam hal ini meningkatkan kemampuan budaya hidup sehat. Seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin (posyandu).
4. Pendidikan yang ditunjukkan kepada orang dewasa, termasuk wanita di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem pengajaran. Pendidikan disini merupakan proses pembangunan yang ditujukan pada kemampuan peningkatan pendidikan yang dimiliki setiap masyarakat khususnya pada wanita. Pendidikan non formal seperti pelatihan menjahit, pembuatan kue, pembuatan kerajinan, dan lain-lain¹⁸.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

¹⁸ Wahyuni, Andi, dkk., *Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sindereng Rappang*, Praja, Vol. 9, No. 1, 2021

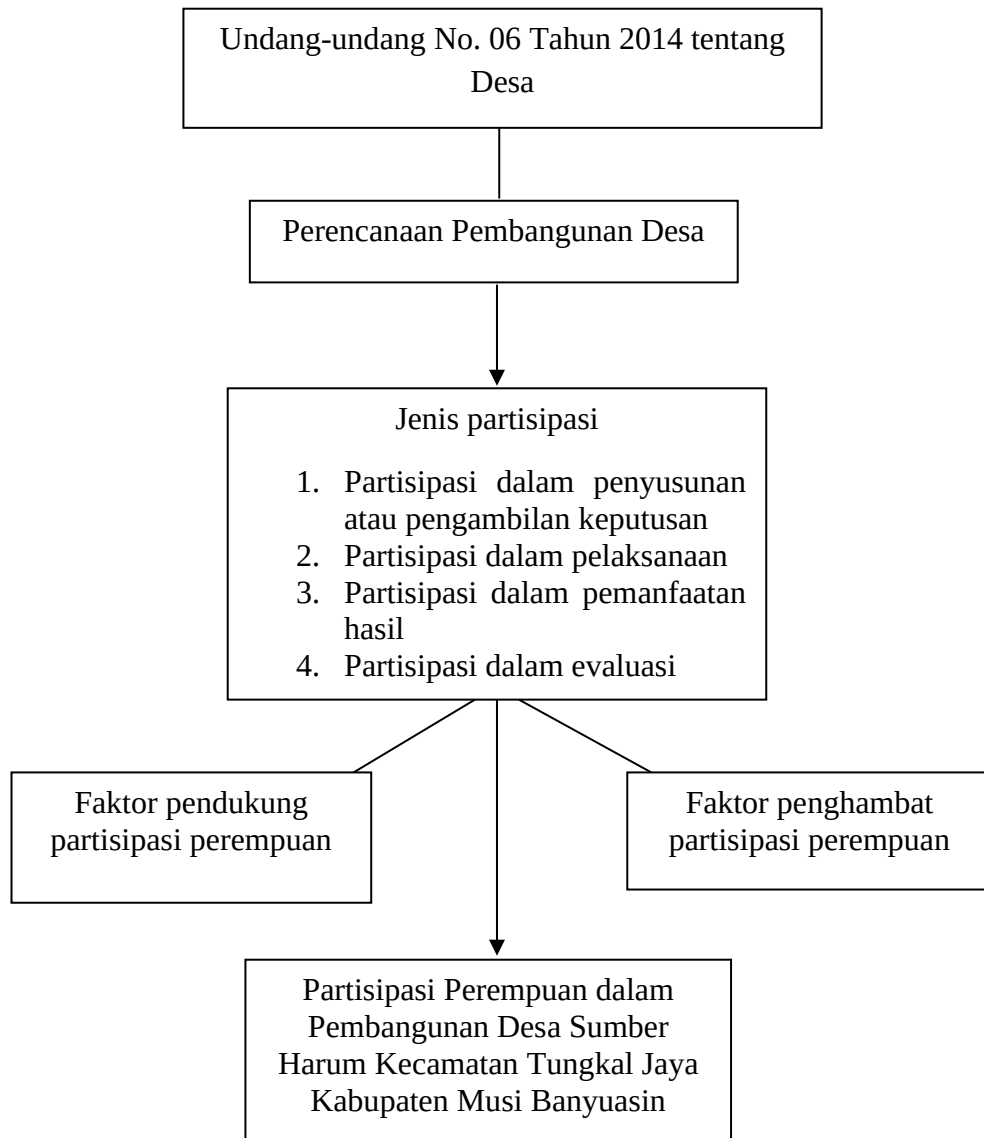
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang terencana yang terdiri dari metode, proses dan tujuan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan desa diharapkan menjadi pembangunan yang berwawasan dan menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa yang harus berkaitan dengan sosio ekonomis masyarakat.

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

F. Kerangka Pikir

Gambar. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti, 2024

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan proses yaitu dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah²⁰. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi suatu gejala, kenyataan sosial atau fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan atau medeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan baik menggunakan angka-angka ataupun kata-kata²¹.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini Desa Sumber Harum tepatnya mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Sumber Harum di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara,

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

²¹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm. 65.

dokumentasi serta informasi yang di dapat dari informan dan masyarakat Desa Sumber Harum serta pengamatan secara langsung. Sumber data sekunder, yaitu data diperoleh dari dokumen ataupun buku yang telah tersusun dan berkaitan dengan penelitian ini dan juga data lain yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

d. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian²². Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data, yaitu:

1. Kepala Desa Sumber Harum Ibu Manawiyah Siregar
2. Sekretaris Desa Sumber Harum Bapak Kamaludin
3. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sumber Harum Ibu Dewi Oktavia
4. Tokoh Masyarakat Bapak Karman
5. Masyarakat Desa Sumber Harum terutama perempuan didesa tersebut, Ibu Sulastri sebagai keterwakilan Perempuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 85.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data secara observasi memiliki ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tetapi dapat juga menggunakan objek-objek alam lainnya. Observasi biasanya digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan yang diamati tidak terlalu luas²³. Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data utama dalam menilai Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa sebagai Perwujudan dari Kesetaraan Gender di Desa Sumber Harum yang dilakukan secara langsung.

2. Wawancara

Menurut Banister dkk, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan wawancara antara lain untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain²⁴.

3. Dokumentasi

²³Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 54.

²⁴Warul Walidin dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 133-134.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis²⁵. Dokumentasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pengambilan gambar ketika wawancara dan juga dapat berupa data tambahan yang diperoleh dari pihak informan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa sebagai bentuk perwujudan kesetaraan gender di desa sumber harum.

f. Keaslian Data/Triangulasi

Triangulasi adalah penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang suatu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data tertentu dengan cara yang berbeda. Triangulasi teknik menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi²⁶.

²⁵ *Ibid*, hlm. 138.

²⁶ *Ibid*, hlm. 140.